



Analisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan BUMD terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung

Laura Evita Dewi

Universitas Padjajaran

lauraevita26@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Mei 2022

Disetujui 2 Juli 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

Kata kunci:

Kontribusi; Pertumbuhan;

Efektivitas, BUMD;

Pendapatan asli daerah

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota yang diperoleh dari pembagian laba/deviden dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada BUMD. Penerimaan pembagian laba/deviden dari BUMD selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berada di wilayah Pemerintah Daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk melihat Pertumbuhan, Efektifitas dan Kontribusi yang diberikan oleh BUMD terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bandung dalam rentang waktu tahun 2016 s.d 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa LRA dan CaLK yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Bandung. Analisisnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari anggaran dan realisasi PAD yang berasal dari BUMD dan PAD Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir pertumbuhan realisasi penerimaan BUMD mengalami fluktuasi rata-rata sebesar 7,94%, tingkat efektifitas penerimaan BUMD rata-rata sebesar 102,89% atau sangat efektif namun demikian kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD rata-rata sebesar 0,63% atau sangat kurang.

ABSTRACT

Regional Owned Enterprises (BUMD) as a source of Regional Original Income (PAD) for Regional/Provincial/Regency/City Governments which are obtained from the distribution of profits/dividends from capital participation made by local governments to BUMDs. Proceeds from the distribution of profits/dividends from the BUMD will then be used to finance development in the area of the Regional Government. This research was conducted in Bandung Regency with the aim of looking at the growth, effectiveness and contribution given by BUMD to increasing PAD in Bandung Regency in the period 2016 to 2020. The data used is secondary data carried out with technical documentation. CaLK obtained from the Bandung Regency BPKAD. The analysis uses a quantitative approach by using secondary data sources consisting of the budget and the realization of PAD originating from BUMD and PAD Bandung Regency. The results show that in the last five years the growth of BUMD revenue has fluctuated an average of 7.94%, the effectiveness level of BUMD revenue is on average 102.89% or very effective, however, the contribution of BUMD revenue to PAD is on average 0.63% or very less.

Keywords :

Contribution; growth;

Effectiveness, BUMD;

Locally-generated revenue



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Rinaldi, 2013). Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencari potensi sumber pendapatan daerahnya untuk menopang pembangunan di daerahnya dan untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut salah satunya berasal dari penerimaan yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk menciptakan penerimaan BUMD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, maka pemerintah daerah mendirikan BUMD di berbagai pemerintah provinsi/kabupaten dan kota yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Rahmawati & MM, 2019).

Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam upaya untuk meningkat sumber PADnya, mendirikan tiga BUMD yaitu PDAM Tirta Raharja, PT BPR Kerta Raharja dan PT Citra Bangun Selaras. Ketiga BUMD tersebut selain sebagai salah satu sumber penerimaan PAD, juga didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Handayani, 2018).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 40 menyatakan bahwa BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Selain itu pada Pasal 331 dinyatakan bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pada Pasal 6 menyatakan, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan Usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah, lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah;
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha

Dalam Stuktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan yang berasal dari bagian laba BUMD dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang merupakan bagian PAD. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain- Lain PAD yan Sah (Rumende et al., 2021).

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap kontribusi penerimaan laba dari BUMD di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, yang hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan BUMD dibandingkan dengan PAD masih sangat kurang (Nurmiati et al., 2019), (Heriasman & Suwaji, 2021), (Nasir, 2019) dan (Lazuardi, 2019).

Namun berdasarkan berbagai hasil penelitian, sebagian besar BUMD yang didirikan oleh pemerintah daerah tersebut pada kenyataannya belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan PAD, padahal pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal atau suntikan dana yang cukup besar (Ciputra, 2013). Hal ini juga ditunjukkan dengan jumlah PAD yang terbesar masih bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan beban bagi APBD karena penyertaan modal atau suntikan dana untuk BUMD tersebut lebih besar dibandingkan dengan kontribusi penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan pendirian BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai (LIPI, 2010).

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD selama lima tahun terakhir (2016-2020) pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2016-2020) pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait kontribusi BUMD terhadap PAD dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bandung dengan jangka waktu selama lima tahun terakhir (2016-2020). Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari anggaran dan realisasi PAD yang berasal dari BUMD dan PAD Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi data APBD Pemerintah Kabupaten Bandung yang diperoleh dari LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2016 s.d TA 2020.

Analisis data yang digunakan terdiri atas:

Analisis Pertumbuhan

Pertumbuhan atas penerimaan BUMD menurut Mahmudi (2010) dalam Karlina & Handayani (2017) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPR = \frac{P_{th-n} - PR_{th-n-1}}{PR_{th-n-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

PPR = Pertumbuhan PAD,

P_{th-n} = Penerimaan PAD

PR_{th-n-1} = Penerimaan PAD Tahun Sebelumnya

Analisis Efektivitas

Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah *Charge Performance Index* (CPI). Adapun rumus menurut Halim (2017) yang digunakan:

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang besar, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMD semakin efektif dan sangat efektif bila dapat mencapai target seratus persen, demikian sebaliknya (Daula Y, 2021). Adapun nilai efektivitas dapat dilihat pada tabel 1

$$CPI = \frac{REALISASI PEMUNGUTAN}{TARGET PENERIMAAN} \times 100 \%$$

Tabel 1 Klasifikasi Efektivitas Pengelolaan BUMD

PRESENTASE KRETERIA	KRETERIA EFEKTIFITAS
Diatas 100 %	Sangat Efektif
91 % - 100 %	Efektif
81 % - 90 %	Cukup Efektifitas
60 % - 80 %	Kurang Efektivitas
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Analisis Proporsi

Untuk mengukur atau menghitung kontribusi/share penerimaan BUMD terhadap PAD dapat digunakan analisis proporsi yaitu membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan masing-masing sumber PAD dengan pencapaian atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan dengan seratus persen, atau diformulasikan menurut Halim (2017) sebagai berikut:

$$P = \frac{X_i}{X_t} \times 100 \%$$

Dimana:

P = Kontribusi

X_i = Penerimaan BUMD

X_t = Total PAD Daerah

Tabel 2 kriteria kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Baik

Diatas 50% Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tiga BUMD yaitu PDAM Tirta Raharja, PT. BPR Kerta Raharja dan PT. Citra Bangun Selaras. Hasil analisa dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2016-2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung diketahui realisasi penerimaan dari tiga BUMD pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang adalah pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Tiga BUMD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016 s.d 2020

No	Nama BUMD	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
	PDAM					
1	Tirta Raharja	2.915.000.000	3.200.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	4.000.000.000
	PT BPR					
2	Kerta Raharja	2.091.102.545	2.162.924.389	2.356.899.555	2.619.226.542	3.033.381.2830
	PT Citra					
3	Bangun Selaras	45.000.000,00	51.409.100,00	85.490.111,00	0,00	0,00

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2016 s.d 2020

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada setiap tahun pada dua BUMD yaitu PDAM Tirta Raharja dan PT BPR Kerta Raharja. Namun penerimaan pendapatan dari PT.Citra Bangun Selaras pada TA 2019 dan TA 2020 sama sekali tidak memberikan kontribusi pendapatannya.

Tabel 4 Pertumbuhan Penerimaan BUMD Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	Target Penerimaan BUMD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi Penerimaan BUMD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2016	5.016.584.447,00		5.051.102.545,00	
2	2017	5.412.586.033,00	7,32	5.414.333.489,00	6,71
3	2018	5.281.115.500,00	(2,49)	5.942.389.666,00	8,89
4	2019	6.386.309.972,00	17,31	6.369.226.542,00	6,70
5	2020	6.938.015.055,00	7,95	7.033.381.283,00	9,44
	Rata-rata		7,52		7,94

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2016 s.d 2020

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan BUMD secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 target penerimaan mengalami penurunan sebesar 2.49% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun walaupun target penerimaannya mengalami penurunan, realisasi penerimaan BUMD pada tahun 2018 mengalami peningkatan atau naik sebesar 8,89 % dibandingkan tahun 2017. Sedangkan untuk realisasi penerimaan BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan peningkatan/pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,44%.

Tabel 5 Efektifitas Penerimaan BUMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	Target BUMD (Rp)	Realisasi BUMD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
1	2016	5.016.584.447,00	5.051.102.545,00	100,69	Sangat Efektif
2	2017	5.412.586.033,00	5.414.333.489,00	100,03	Efektif
3	2018	5.281.115.500,00	5.942.389.666,00	112,52	Sangat Efektif
4	2019	6.386.309.972,00	6.369.226.542,00	99,73	Efektif
5	2020	6.938.015.055,00	7.033.381.283,00	101,37	Sangat Efektif
	Rata-rata			102,89	Sangat Efektif

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2016 s.d 2020

Efektivitas Penerimaan BUMD Kabupaten Bandung pada TA 2016 s.d. 2020 adalah sangat efektif. Selama empat tahun yaitu pada tahun 2016 s.d. 2018 dan 2020, realisasasi penerimaan BUMD melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan terlihat tidak mencapai target penerimaan atau sebesar 99,73%, namun masih berada dalam kategori efektif.

Tabel 6 Kontribusi masing-masing BUMD terhadap Total Penerimaan BUMD Kabupaten Bandung

Nama BUMD	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Rata-rata	Kriteria
PDAM Tirta							
Raharja	57,71	59,10	58,90	58,88	56,87	58,29	Sangat Baik
PT BPR Kerta							
Raharja	41,40	39,95	39,66	41,12	43,13	41,05	Baik
PT Citra Bangun							
Selaras	0,89	0,95	1,44	-	-	0,66	Sangat Kurang

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2016 s.d 2020

Pada tabel 6 di atas dapat dilihat kontribusi penerimaan masing-masing BUMD terhadap total penerimaan BUMD pada setiap tahunnya adalah berfluktuasi pada setiap tahunnya. Satu BUMD yaitu PDAM Tirta Raharja memberikan kontribusi terbesar atau sangat baik yaitu dengan rata-rata sebesar 58,29%. Sedang satu BUMD yaitu PT.Citra Bangun sangat kurang dalam memberikan kontribusi, bahkan pada TA 2019 dan 2020 sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan.

Tabel 7 Kontribusi BUMD terhadap Total PAD Kabupaten Bandung

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Penerimaan		Persentase (%)	Kriteria
		BUMD			
2016	856.514.244.254,37	5.051.102.545,00		0,59	sangat kurang
2017	936.905.730.680,24	5.414.333.489,00		0,58	sangat kurang
2018	927.543.321.132,26	5.942.389.666,00		0,64	sangat kurang
2019	1.025.354.252.357,57	6.369.226.542,00		0,62	sangat kurang
2020	1.019.355.741.053,99	7.033.381.283,00		0,69	sangat kurang
Rata-rata				0,63	sangat kurang

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2016 s.d 2020

Rata-rata kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,624% yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan BUMD sangatlah kurang, walaupun kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD pada setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan.

KESIMPULAN

Realisasi Penerimaan BUMD selama tahun 2016 s.d. 2020 mengalami pertumbuhan yang positif pada setiap tahunnya, Tingkat efektivitas penerimaan Badan BUMD selama 5 tahun terakhir secara rata-rata sebesar 102,89% atau berada pada kategori sangat efektif. Namun walaupun demikian kontribusi penerimaan BUMD terhadap total PAD selama periode tahun 2016 s.d. 2020 masih sangat kurang, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun adalah sebesar 0,63%. Untuk dapat meningkatkan kontribusi penerimaan BUMD terhadap total PAD, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan optimalisasi bidang usahanya dengan meningkatkan produksi, melakukan efisiensi sumber daya keuangan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciputra, I. (2013). *Ciputra Quantum LEAP* (Vol. 1). Elex Media Komputindo.
- Daula Y, L. M. (2021). Analisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Medan. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi*. Salemba Empat.

- Handayani, I. T. (2018). Analisis pengelolaan perusahaan daerah isen mulang Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(2), 1–18.
- Heriasman, H., & Suwaji, S. (2021). Efektifitas dan kontribusi laba badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(1), 60–68.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Lazuardi, M. (2019). Analisis kontribusi retribusi daerah dan laba bumd terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 1–20.
- LIPI, P. (2010). *Revitalisasi BUMD dalam perekonomian daerah lembaga ilmu*.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Nurmiati, N., Diana, F., & Murbayani, M. (2019). Kontribusi badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur*, 1(1), 89–100.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta
- Rahmawati, D. N., & MM, A. (2019). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota eks-karesidenan madiun tahun 2014-2018. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rinaldi, U. (2013). Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Repository Polnep*.
- Rumende, H. J., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 31–50.